

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Kabupaten Banjarnegara

Sesanti Kabupaten Banjarnegara yang berbunyi “Wani Memetri Rahayuning Praja” memiliki makna bahwa segenap warga Kabupaten Banjarnegara bertekad bulat dalam melestarikan kemakmuran menuju kebahagiaan lahir dan batin bagi rakyat dan pemerintahannya. Hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tingkat II Banjarnegara Nomor 11 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Lambang Daerah (KOMINFO, Profil, 2013).

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah sebesar 1.064,52 km² atau 3,29% dari luas wilayah Jawa Tengah yang terletak antara 7°12’ hingga 7°31’ Lintang Selatan dan 109°20’10” hingga 109°45’50” Bujur Timur. Kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lain di Jawa Tengah.

Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Batang

Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo

Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen

Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Banyumas

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Banjarnegara



Sumber: kabbanjarnegara.go.id

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah Barat yang membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian tempat masing-masing wilayah di Kabupaten Banjarnegara secara umum tidak sama yakni sekitar 40-2300 meter di atas permukaan laut dengan perincian kurang dari 100 meter (9,85%), antara 100-500 meter (28,74%), dan lebih dari 1000 meter (24,40%). Menurut kemiringan tanahnya, maka 24,61% dari luas wilayah memiliki kemiringan 0-15% dan 45,04% dari luas wilayah memiliki kemiringan antara 15-40%, sedangkan sisanya yakni 30,35% dari luas wilayahnya memiliki kemiringan lebih dari 40% (KOMINFO, Letak Geografis, 2013).

Sebagian besar wilayah Banjarnegara dengan presentase lebih kurang 60% merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan. Selain itu, terdapat sungai besar yakni Sungai Serayu dengan anak sungainya: Kali Merawu, Kali Tulis, Kali Sapi, Kali Gintung dan Kali Pekacangan. Sungai Serayu beserta anak-anak sungainya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pengairan (irigasi) areal sawah seluas 9.813,88 ha. Umumnya, rata-rata bulan basah di wilayah ini lebih banyak dari bulan kering dengan curah hujan pertahun rata-rata 3000 milimeter, sedangkan temperatur udara rata-rata 20-26 °C (KOMINFO, Letak Geografis, 2013).

Keadaan geologis Kabupaten Banjarnegara pada umumnya merupakan struktur batuan berbentuk lapisan dengan kondisi batuan mudah longsor dan banyak patahan/sesar terutama di wilayah bagian utara sehingga cukup membahayakan bangunan fisik/prasarana (KOMINFO, Letak Geografis, 2013).

2.1.2 Wilayah Administrasi

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang ada di bagian barat Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 106,970,99 Ha. Kabupaten Banjarnegara secara administrasi pemerintahan, terdiri dari 20 Kecamatan dengan 266 Desa dan 12 Kelurahan serta terbagi ke dalam 966 Dusun, 1.335 Rukun Warga (RW) dan 5.459 Rukun Tetangga (RT) (BPS, 2018).

Tabel 2.1
Statistik Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

Wilayah Administrasi	2015	2016	2017
Kecamatan	20	20	20
Desa	266	266	266
Kelurahan	12	12	12
RW	1.316	1.316	1.335
RT	5.451	5.451	5.459

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjarnegara, 2018.

Adapun pembagian wilayah menurut Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Kabupaten Banjarnegara

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Susukan	15	
2.	Purworejo/Klampok	8	
3.	Mandiraja	16	
4.	Purwonegoro	13	
5.	Bawang	18	
6.	Banjarnegara		9
7.	Sigaluh	15	1
8.	Madukara	17	3
9.	Banjarmangu	17	
10.	Wanadadi	9	
11.	Rakit	11	
12.	Punggelan	17	
13.	Karangobar	12	
14.	Wanayasa	12	
15.	Kalibening	15	
16.	Batur	8	
17.	Pagentan	15	
18.	Pejawaran	17	
19.	Pagedongan	9	
20.	Pandanarum	9	
Total		183	13

Sumber: kabbanjarnegara.go.id

2.1.3 Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara yaitu sebanyak 912.917 Jiwa dengan komposisi penduduk yang didominasi penduduk muda. Banjarnegara mempunyai banyak sumber daya manusia akibat adanya dominasi sari penduduk usia muda (usia produktif), hal ini dapat diartikan sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Dari jumlah penduduk sebanyak lebih dari 912 ribu jiwa dengan sex ratio sebesar 100,41 dan kepadatan penduduk sebanyak 853 per km², terdapat penduduk dengan kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 25,28%, kelompok usia 15-64 tahun sebanyak 66,89% dan kelompok usia ≥ 65 tahun sebanyak 7,82% (BPS, 2018).

Tabel 2.3
Indikator Kependudukan Kabupaten Banjarnegara

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	901.814	907.410	912.917
Sex Ratio	100.41	100.39	100.41
Kepadatan Penduduk	843	848	853

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjarnegara, 2018

Tabel 2.4
Presentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banjarnegara

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 Tahun	25,86	24,71	26,28
15-64 Tahun	66,59	67,20	66,89
≥ 65 Tahun	7,55	8,10	7,82

Sumber: BDA BPS Kabupaten Banjarnegara, 2018

2.1.4 Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Banjarnegara Sejahtera dan Bermartabat”

b. Misi

Guna mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berbasis pertanian dan potensi lokal yang berdaya saing
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan konsisi aman, damai, demokratis, dan religius
4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan prioritas penegakan hukum, penghargaan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
6. Mewujudkan pembangunan karakter bangsa melalui pembangunan seni budaya, penghargaan tradisi, dan kearifan lokal

2.2 Deskripsi Pendidikan Kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara

Pendidikan merupakan kebijakan pembangunan dengan skala prioritas tertinggi, selain sebagai amanah konstitusi. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan jenjang SD/SMP berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2017 (Tempo.co, 2017).

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017, tercatat 98 SMP yang terdiri dari 75 SMP Negeri, dan 23 SMP Swasta yang tersebar di 20 kecamatan di wilayah Banjarnegara. Data Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.5
Data Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjarnegara

No.	Wilayah	Jenis SMP	
		Negeri	Swasta
1	Kec. Mandiraja	4	2
2	Kec. Purwanegara	6	0
3	Kec. Banjarnegara	5	5
4	Kec. Susukan	4	1
5	Kec. Punggelan	6	1
6	Kec. Purwareja Klampok	3	3
7	Kec. Bawang	5	0
8	Kec. Kalibening	6	1
9	Kec. Rakit	2	1
10	Kec. Pejawaran	4	1
11	Kec. Madukara	3	2
12	Kec. Banjarmangu	2	2
13	Kec. Pagentan	5	0
14	Kec. Wanayasa	4	0
15	Kec. Karangobar	3	1
16	Kec. Wanadadi	2	2
17	Kec. Batur	2	0
18	Kec. Sigaluh	2	0
19	Kec. Pagedongan	3	1
20	Kec. Pandanarum	4	0
Total		75	23

Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017 (data diolah)

Guna menyukseskan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka perlu adanya peningkatan kualitas tenaga pengajar. Rasio guru terhadap sekolah negeri pada tahun 2017 di Kabupaten Banjarnegara yakni sebesar 6,78 untuk tingkat SD, 21,24 untuk tingkat SMP, dan 33,31 untuk tingkat SMA/SMK. Sedangkan rasio guru terhadap sekolah swasta sebesar 13,83 untuk tingkat SD, 10,14 untuk tingkat SMP, dan 17 untuk tingkat SMA/SMK (BPS, 2018).

Pendidikan kebencanaan merupakan salah satu upaya dari mitigasi bencana. Dalam konteks mitigasi atau pengurangan mitigasi bencana, sektor

pendidikan yang mana menjadi penentu dalam pengurangan mitigasi bencana tersebut. Sektor pendidikan dapat menjadi agen utama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, PRB dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana guna mengurangi akibat dan dampak dari ancaman bencana. Pendidikan kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara telah diimplementasikan di Sekolah Menengah. Secara spesifik, pendidikan kebencanaan yang diterapkan di Sekolah Menengah Pertama berupa Muatan Lokal Kebencanaan yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (hasil wawancara dengan Bapak Andri Sulisty, SOR, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjarnegara, 21 Januari 2019).

Tabel 2.6
Riwayat Bencana di Kabupaten Banjarnegara

No.	Jenis Bencana	Tanggal	Lokasi	Korban
1.	Tanah Longsor	4 Januari 2006	Dusun Gunungraja, Desa Sijeruk, Kec. Banjarmangu	90 jiwa meninggal dunia, 16 orang luka ringan.
2.	Tanah Longsor	12 Desember 2014	Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kec. Karangobar	108 orang meninggal dunia, 125 orang belum ditemukan.
3.	Tanah Gerak	8 Januari 2018	Desa Bantar, Kec. Wanayasa	Tidak ada korban jiwa.
4.	Gempa Bumi	18 April 2018	Desa Kasinoman, Kertosari dan Plorengan Kec. Kalibening	27 jiwa luka ringan, 2 jiwa

				meninggal dunia.
--	--	--	--	------------------

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Potensi bencana yang ada di Kabupaten Banjarnegara termasuk tinggi, yakni hampir 70%. Sudah banyak peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Banjarnegara, bahkan sebagian besar diantaranya berada di sekitar lingkungan sekolah. Seperti halnya, peristiwa gempa bumi di Desa Kertosari, Kecamatan Kalibening yang mana SMP Negeri 2 Kalibening terdampak akibat bencana tersebut. Selain itu, masih cukup tingginya korban jiwa akibat peristiwa bencana mengindikasikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan dasar terkait kebencanaan. Oleh sebab itu, BPBD Banjarnegara bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan kebencanaan jenjang sekolah menengah sebagai bentuk pengurangan resiko bencana di sekolah. Kerjasama yang dilakukan berupa penyusunan Buku Pintar Sekolah Tangguh Bencana dan kegiatan sosialisasi maupun workshop kebencanaan bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Kerjasama tersebut dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan akan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat (hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, S.Pd., M.M, Kasi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, 21 Januari 2019).

Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan bagi jenjang sekolah menengah yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan

pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam undang-undang tersebut jelas diterangkan bahwa salah satu bentuk penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah berupa pendidikan dan pelatihan mengenai kebencanaan yang kemudian diterjemahkan oleh BPBD Banjarnegara menjadi program pendidikan kebencanaan, salah satunya bagi sekolah. Implementasi pendidikan kebencanaan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yakni berupa pengintegrasian materi kebencanaan pada kurikulum sekolah dan ekstrakurikuler. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan. Beberapa sekolah yang telah menerapkan mulok kebencanaan, diantaranya SMP Negeri 1 Wanayasa, SMP Negeri 1 Batur, SMP Negeri 1 Karangobar, dan SMP Ma'arif NU 01 Karangobar.